

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah mensyaratkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus didukung oleh dukungan personil, peralatan, dan pembiayaan yang memadai. Dengan terpenuhinya syarat undang-undang tersebut, pemerintah diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah dilimpahkan. Dalam otonomi daerah, pemerintah pusat telah membagi berbagai sumber pembiayaan kepada daerah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah dilimpahkan. Menurut ketentuan yang ada dalam pasal 2 undang-undang nomor 33 tahun 2004 pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi bersumber dari a) pendapatan asli daerah; b) dana perimbangan; dan c) lain lain pendapatan yang sah.

Salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom dalam penyelenggaraan pembangunan adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Daerah Otonom harus mampu menggali sumber sumber keuangannya, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerahnya (Mahmudi, 2009:3). Santosa dan Rahayu mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan

murni dari daerah yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah. Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai PAD yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. PAD yang kecil akan mempersulit daerah dalam melaksanakan proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri. Padahal dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri. Dengan besarnya tuntutan kepada daerah untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, maka setiap daerah dituntut untuk mengoptimalkan peran PAD di dalamnya.

Jumlah perusahaan merupakan salah satu indikator penting dalam penerimaan pendapatan asli daerah karena perusahaan wajib membayar pajak ke daerah. Semakin banyak jumlah perusahaan di suatu daerah maka pendapatan asli daerah yang sumber utamanya dari pajak akan meningkat dan juga kegiatan di dalam perusahaan tersebut akan meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah (Purwaningsih Esti, 2011: 43-44).

Jumlah Penduduk adalah satu indikator penting dalam suatu negara. Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam Smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan.

(www.ilmuekonomi.net › *Ekonomi Pembangunan*)

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Jika pengeluaran pemerintah besar misalnya untuk belanja modal, pembangunan infrastruktur, maka kegiatan ekonomi akan meningkat, misalnya investasi sehingga pendapatan asli daerah juga meningkat. (Tobing, 2015:6)

Berdasarkan uraian di atas dan melihat kemajuan ekonomi dan keingintahuan penulis mengenai seberapa jauh kemandirian provinsi Jawa Tengah, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh jumlah perusahaan, jumlah penduduk, dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah. Jawa Tengah merupakan salah satu pusat industri di Indonesia yang di dalamnya terdiri dari industri-industri ternama. Seperti industri meubel Jepara, industri garmen rodeo prima jaya dll yang sudah memberikan banyak nilai tambah buat provinsi Jawa Tengah. Di sini yang dilihat jumlah perusahaan besar dan sedang di provinsi Jawa Tengah karena perusahaan yang besar dan sedang lebih memberi kontribusi yang besar terhadap PAD. Di samping itu, Jawa Tengah juga memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak baik yang bekerja maupun tidak bekerja yang memiliki pola konsumtif. Banyaknya penduduk akan meningkatkan kegiatan ekonomi di provinsi Jawa Tengah. Banyaknya perusahaan dan penduduk di provinsi Jawa Tengah ini maka otomatis pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk belanja modal, infrastruktur, dan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat akan meningkat. Meningkatnya belanja modal, infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat maka kegiatan ekonomi di daerah tersebut akan meningkat dan hal tersebut

akan meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Besarnya PAD ini akan mencerminkan kemandirian daerahnya yang mampu membiayai belanja daerahnya sendiri. Kemandirian daerah ini dapat mensejahterakan masyarakat daerah tersebut

Selama kurun waktu 2008-2013, di ketahui bahwa nilai PAD di provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat dari tahun ke tahun yang berarti daerah ini berhasil dalam pembangunan ekonomi dan dari tahun ke tahun provinsi Jawa Tengah mulai semakin mandiri yang ditunjukkan dengan PAD dari tahun ke tahun. Hal ini memberikan indikasi yang positif terhadap kemajuan ekonomi di provinsi Jawa Tengah yang memiliki banyak perusahaan besar maupun sedang, banyak penduduk dll. Hal ini dapat di lihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010 (Ribuan Rupiah)

Tahun	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Harga Berlaku	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Harga Konstan 2010
2008	4.057.776.196	4.473.843.656,00
2009	4.243.887.975	4.449.921.238,69
2010	4.417.869.229	4.417.869.229,00
2011	5.088.713.212	4.828.001.149,90
2012	6.044.043.900	5.499.584.986,35
2013	7.590.460.572	6.493.122.816,08

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2013, diolah.

Trend pertumbuhan positif dari PAD bisa jadi kontribusi dari jumlah perusahaan besar dan sedang walaupun dari tahun ke tahun terus menurun tetapi pada tahun sebelumnya cenderung meningkat misalnya tahun 2006 perusahaan di Jawa Tengah mencapai 5.537 perusahaan besar dan sedang dan ini angka yang paling tinggi. Di tahun-tahun sebelumnya jumlah perusahaan di provinsi Jawa Tengah meningkat dan provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang

memiliki perusahaan terbanyak di pulau Jawa selain DKI Jakarta, Jawa Timur, maupun Jawa Barat. Di provinsi Jawa Tengah ini terdapat banyak perusahaan ternama misalnya perusahaan sari roti, teh botol sosro, meubel Jepara di kabupaten Jepara. Perusahaan ini mampu menghasilkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi dengan hasil-hasil produksi yang besar yang akan di gunakan di daerah tersebut maupun akan didistribusikan ke daerah lain yang membutuhkan dan juga perusahaan ini juga banyak menyerap tenaga kerja di daerah tersebut untuk dipekerjakan di perusahaan mereka. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Perusahaan Besar dan Sedang di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008-2013 (Buah)

Tahun	Jumlah Perusahaan
2008	4.678
2009	4.213
2010	3.887
2011	3.850
2012	3.736
2013	3.666

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2013, diolah.

Namun demikian, PAD bukan satu-satunya ditentukan oleh jumlah Perusahaan saja. Selain jumlah perusahaan juga bisa ditentukan oleh jumlah penduduk. Jumlah penduduk di provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan yang cukup pesat. Jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Salah satu sifat penduduk itu yaitu konsumtif sehingga dari sifat penduduk yang konsumtif dan memiliki banyak keinginan ini dapat meningkatkan kegiatan

ekonomi daerah dan otomatis pendapatan asli daerah pun akan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Orang)

Tahun	Jumlah Penduduk
2008	32.064.893
2009	32.228.268
2010	32.382.657
2011	32.725.378
2012	32.998.692
2013	33.264.339

Sumber : Data.worldbank.org tahun 2013, diolah.

Demikian juga halnya dengan data pengeluaran pemerintah di Jawa Tengah juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pengeluaran pemerintah ditujukan salah satunya untuk belanja modal, infrastruktur, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Hal ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga nantinya berpengaruh pada peningkatan PAD. Pengeluaran pemerintah untuk belanja modal, infrastruktur maupun untuk kesejahteraan masyarakat yang besar otomatis akan meningkatkan pendapatan asli daerah di daerah tersebut. Masyarakat yang sejahtera merupakan salah satu keberhasilan dari daerah tersebut yang mampu mengatur keuangan daerahnya untuk hal-hal yang meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Hal ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan dari kegiatan ekonomi ini akan berdampak pada meningkatnya PAD yang akan mencerminkan kemandirian dari suatu daerah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Jumlah Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013
Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010 (Ribu Rupiah)

Tahun	Jumlah Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Harga Berlaku	Jumlah Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Harga Konstan 2010
2008	5.600.610.600	6.174.873.869,90
2009	6.380.477.669	6.709.229.935,85
2010	7.530.673.277	7.530.673.277,00
2011	8.786.745.596	8.336.570.774,19
2012	11.395.744.293	10.369.194.079,16
2013	15.166.326.930	12.973.761.274,59

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2013, diolah.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Perusahaan, Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 1985-2014”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi Jawa Tengah tahun 1985-2014.
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi Jawa Tengah tahun 1985-2014.
3. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi Jawa Tengah tahun 1985-2014.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Jumlah Perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi Jawa Tengah tahun 1985-2014.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi Jawa Tengah tahun 1985-2014.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi Jawa Tengah tahun 1985-2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, antara lain :

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pengambilan kebijakan oleh pemerintah terkait dengan peningkatan kemandirian daerah bagi kemajuan perekonomian daerah.
2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi kemajuan pengembangan penelitian.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan peneliti dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta.

1.5 Hipotesis

Dalam penelitian ini,hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah :

1. Diduga Jumlah Perusahaan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi Jawa Tengah tahun 1985-2014.
2. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi Jawa Tengah tahun 1985-2014.

3. Diduga Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi Jawa Tengah tahun 1985-2014.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dapat dilakukan dengan beberapa sistematika penulisan. Sistematika penulisan yang ada dalam proposal ini dijelaskan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bagian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berisikan landasan teori dan studi terkait. Landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang meliputi pendapatan asli daerah yang dipengaruhi oleh variabel jumlah perusahaan, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah dan studi terkait yang berisi tentang penelitian sebelumnya

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari deskripsi pembahasan mengenai data, model penelitian, dan alat analisis yang digunakan untuk mengolah data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Hasil dan Pembahasan dijelaskan berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan mengenai data yang diperoleh yang akan ditulis dan dianalisis untuk membuktikan kebenaran hipotesis.

Bab V Penutup

Penutup memuat kesimpulan dan saran diberikan oleh peneliti sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam kelanjutan pengembangan penelitian ini.

